

PENGEMBANGAN PETERNAKAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KETERGANTUNGAN DAN MENUMBUHKAN EKONOMI KERAKYATAN

(Livestock Development Based on Local Resources to Decreasing of Dependency Level and Improve of Community Economics)

Hartoko

Fakultas Peternakan UNSOED Purwokerto

ABSTRACT

To decrease the level of dependency on import goods, it is necessary to develop local based animal husbandry. This action has an important meaning in order to improve community economics in Indonesia. Some ideas to motivate the development of the local based animal husbandry, are: first, mapping of the local resources, including specific superior local animals. Second, to support the continuity of feedstuffs availability, it is necessary to build warehouses, siloes, and depots of feedstuffs at the core areas of feedstuffs production. Third, germ plasm/ genuine animal conservation. Fourth, publication of popular scientific magazine and, Fifth, development of integrated farming system, horizontally as well as vertically, and market strategi. Finally, the key factor is human resources, so the empowerment of farmers is necessary to grow-up the local based animal husbandry.

Key words : Animal husbandry, local resources, dependency, community economics

PENDAHULUAN

Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika, telah mengakibatkan dampak negatif yang sangat luas bagi perekonomian nasional. Dampak tersebut bahkan telah merasuk ke berbagai sendi kehidupan masyarakat Indonesia, kehidupan sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Masalah-masalah ini lebih lanjut berdampak balik (feed-back effects) secara berlipat ganda, sehingga makin mem perburuk perekonomian nasional.

Pada kegiatan produksi, kandungan impor yang tinggi, telah menyebabkan naiknya biaya produksi, sehingga harga jual produk melambung

jauh di atas daya jangkau konsumen. Akibatnya, banyak usaha, baik yang besar, sedang, atau kecil, terpaksa mengurangi atau bahkan meng hentikan usaha. Perusahaan-perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja dengan cara pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bukan hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga menimbulkan sejumlah masalah sosial dan bahkan menjurus ke arah munculnya berbagai tindak kriminal.

Dalam keadaan seperti ini, sektor-sektor usaha yang sedikit menggunakan bahan impor, yaitu usaha-usaha yang berbasis sumberdaya lokal akan tampil menjadi tumpuan bagi pemulihan ekonomi, misalnya sektor-sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan

peternakan. Pengembangan peternakan yang berbasis pada sumberdaya lokal diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi yang tertekan karena pengaruh nilai tukar rupiah.

PETERNAKAN PADA MASA ORDE BARU

Pembangunan peternakan pada masa lalu terpola oleh kebijakan makroekonomi yang banyak bersumber pada bahan impor. Akibatnya, agribisnis peternakan tertekan oleh ketergantungan dari luar. Padahal bumi Nusantara yang terkenal sebagai jamrud katulistiwa memiliki kekayaan alam yang berlimpah, namun belum didayagunakan secara optimal.

Penelitian Muchdie (1998) menemukan enam dari 26 sektor pertanian (termasuk peternakan) yang memiliki kandungan impor tinggi. Dari keenam sektor tersebut, hanya satu sektor peternakan (budidaya ternak unggas) yang tergolong tinggi. Tabel 1 memperlihatkan kandungan impor total dari 26 sektor pertanian yang diteliti.

Menggunakan metode input-output analisis, peneliti mendapatkan budidaya karet dan tembakau sebagai sektor yang indeks kandungan impor totalnya paling tinggi (2,60 dan 2,40). Yang paling rendah adalah budidaya buah-buahan dan ketela pohon (hanya 0,40 dan 0,30). Pada sektor peternakan, hanya sektor budidaya unggas yang tergolong tinggi (1,80).

Implikasi kebijakannya adalah prioritas pengembangan ditujukan kepada sektor-sektor yang indexnya rendah (<1). Mengembangkan langsung sektor-sektor dengan indeks tinggi (>1) hanya akan memperlemah posisi nilai tukar rupiah dan menguras devisa. Sementara untuk budi daya ternak unggas perlu terlebih dahulu dilakukan upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan. Kata kuncinya adalah pakan. Makin tinggi indeks kandungan impornya, makin tinggi pula tingkat ketergantungannya, juga makin rawan terhadap krisis. Dibidang peternakan, unggas menderita paling parah. Husbandry (2001) dalam laporan khususnya membenarkan hal tersebut, bahwa krisis ekonomi telah meluluh lantakkan dunia peternakan unggas. Betapa tidak, sektor perunggasan sebagai pemasok utama daging nasional mendadak menghentikan produksi, hingga tinggal 30 persen saja. Sementara untuk petelur, menurut Daryono (2001) tinggal 40 persen. Bahan baku produksi yang masih mengandalkan impor, dituding menjadi penyebab”.

Selanjutnya dilaporkan pula kiat peternak Bumiayu dalam menghadapi krismon. Kelompok peternak Paguyuban Tirta Bumi beralih membudidayakan ayam kampung (ayam Bumbar = Bumiayu Baru) sebagai petelur. Alasan mereka, ayam Bumbar lebih tahan sakit, mudah dipelihara, rasa telur lebih disukai dan harganya lebih tinggi serta dijual per butir. Kelebihan lainnya, ayam kampung tidak mengandalkan pakan dari pabrik, cukup dari bahan pakan lokal.

Saking (2001) mengungkapkan bahwa di Sulawesi Selatan, ada ayam kampung (ayam kalosi) yang sangat potensial untuk dikembangkan. Mampu bertelur 180 – 200 butir/tahun/ekor dengan umur produktif sejak .5 bulan sampai 2,5 tahun. Bahkan Daryono (2001) melaporkan adanya ayam kampung unggul yang disebut “AYAM LURIK” yang mampu bertelur 200 – 250

butir/tahun dan tidak memiliki sifat mengeram. Konsumsi pakannya rendah, hanya 80 – 90 g/h/ekor betina dan 90 – 100 g/h/ekor jantan.

Ditinjau dari potensi bahan pakan, Indonesia merupakan negara paling potensial dibanding negara-negara Asia lainnya. Contohnya, jagung, kedelai, dan bekatul berlimpah di negara kita.

Tabel 1. Indeks Kandungan Impor Total

No.	Nama Sektor	Index	Keterangan
1	Budidaya Teh	1,011	Tinggi
2	Budidaya Kelapa Sawit	1,457	Tinggi
3	Budidaya Tebu	1,620	Tinggi
4	Budidaya Karet	2,601	Tinggi
5	Budidaya Tembakau	2,408	Tinggi
6	Budidaya Ternak Unggas	1,843	Tinggi
7	Budidaya Ternak Besar	0,892	Rendah
8	Budidaya Sapi Parah	0,981	Rendah
9	Budidaya Ternak Lain	0,832	Rendah
10	Budidaya Padi	0,803	Rendah
11	Budidaya Jagung	0,788	Rendah
12	Budidaya Ketela Pohon	0,327	Rendah
13	Budidaya Kacang Tanah	0,832	Rendah
14	Budidaya Kedelai	0,654	Rendah
15	Budidaya Sayur-sayuran	0,684	Rendah
16	Budidaya Buah-buahan	0,401	Rendah
17	Budidaya Kelapa	0,639	Rendah
18	Budidaya Tanaman Serat	0,832	Rendah
19	Budidaya Kopi	0,788	Rendah
20	Budidaya Cengkeh	0,892	Rendah
21	Budidaya Pertanian Lain	0,684	Rendah
22	Budidaya Hasil Hutan Kayu	0,758	Rendah
23	Budidaya Hasil Hutan Lain	0,774	Rendah
24	Budidaya Perikanan Laut	0,951	Rendah
25	Budidaya Perikanan Darat	0,684	Rendah
26	Budidaya Pengolahan Ikan	0,862	Rendah

Sumber : Muchdie (1998)

Keterangan :

- Indeks ≥ 1 = berarti tinggi (banyak bergantung pada sumberdaya impor)
- Indeks < 1 = berarti rendah (sedikit bergantung pada sumberdaya impor)

Ditambah dengan areal lahan yang masih luas dan tenaga kerja yang murah, Indonesia sebenarnya dapat menjadi negara yang paling kompetitif di Asia.

Peningkatan produksi bahan makanan ternak tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pangan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Prof. Soedito¹⁾ mengatakan : “Marilah kita tingkatkan ketahanan pangan nasional kita dengan memperkuat mata rantai pakan untuk ternak”. Di samping itu, pemerintah hendaknya memberikan proteksi dan subsidi guna mendorong pengembangan peternakan berbasis sumberdaya lokal.

Senada dengan itu Ir. Djoko Santoso, SU²⁾ anggota komisi bibit nasional, menekankan pentingnya “*political will*”. Tanpa *political will* dari pemerintah, pengembangan peternakan berbasis sumber daya lokal akan tinggal menjadi slogan saja.

Dalam pidatonya pada Dies Natalis XXXI Fakultas Peternakan UGM, Menteri Pertanian mengatakan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang tangguh. Sebenarnya ketangguhan tersebut disebabkan karakteristiknya sendiri. Usahatani umumnya mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.

PENGEMBANGAN PETERNAKAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

TAP MPR No. IV Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemerintah hendak mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi kerakyatan

yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. Meskipun persepsi para pakar tentang ekonomi kerakyatan masih bervariasi, namun agaknya mereka sepakat bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Karena proporsinya yang besar, proporsi usaha kecil mencapai 99,88% dari 33,42 juta unit usaha yang ada. Usaha menengah 0,11%, sedang usaha besar hanya 0,01%, usaha kecil dianggap sebagai “tumpuan harapan” roda perekonomian melalui strategi pemberdayaan ekonomi rakyat.

Saragih (1998) menyatakan bahwa satu-satunya sektor ekonomi yang paling banyak pelaku ekonominya adalah sektor pertanian. Pelaku ekonomi pada sektor ini umumnya relatif kecil-kecil dibanding besarnya pasar. Selain itu, hampir semua komoditas pertanian memiliki produk substitusinya. Karakteristik demikian itu menunjukkan bahwa struktur pasarnya lebih mendekati struktur pasar bersaing sempurna yang sesuai dengan prinsip yang dianut ekonomi kerakyatan. Dalam ekonomi kerakyatan ada dua ciri yang harus dihindari yaitu struktur pasar yang destruktif dan sistem monopolistik.

Pembangunan nasional berasaskan swadaya masyarakat, artinya akan dilaksanakan berdasarkan atas kekuatan sendiri, tanpa menggantungkan dari pihak lain. Pembangunan nasional berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Pembangunan dilaksanakan oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan rakyat pula. Istilah populernya pembangunan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Arah kebijakan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi adalah mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas (termasuk peternakan).

Mubyarto (2000) berpendapat bahwa cara terbaik menghadapi proses globalisasi yang berbahaya, mahal dan penuh resiko ini tidak banyak pilihannya, tetapi harus berprinsip pada rasa percaya diri atau dengan semangat kemandirian mengandalkan pada kekuatan ekonomi rakyat banyak.

Negara kita menerapkan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Bertumpu pada kekuatan yang dimiliki rakyat, dan apa yang ada pada rakyat kecil (peternak rakyat) tidak lain adalah sumberdaya lokal. Dengan keluarnya UU tentang otonomi daerah (UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dengan Daerah), maka pengelolaan pembangunan yang sentralistis dimasa lalu akan berubah kepada desentralistis. Pemda akan diberi wewenang lebih luas dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pemantauan pembangunan daerah. Pemerintah Pusat hanya akan menangani aspek-aspek pembangunan yang sifatnya nasional (kebijakan ekonomi makro), kerjasama internasional dan aspek-aspek pembangunan yang tidak efisien kalau diserahkan daerah, atau yang menyangkut kepentingan antardaerah, seperti pelabuhan ekspor-impor.

Perluasan dan peningkatan otonomi daerah berkaitan erat dengan perwujudan sistem ekonomi kerakyatan karena sistem ini lebih tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan ekonomi masyarakat di daerah-daerah, sehingga tidak saja terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberdayakan lembaga-lembaga adat dan LSM (Mubyarto, 2000).

ISPI (Ikatan Sarjana Ilmu-ilmu Peternakan Indonesia) sebagai organisasi sarjana yang memiliki misi "berilmu amaliah – beramal – ilmiah" dapat berperan aktif menyebarkan informasi dan melakukan penelitian/pengkajian teknologi tepat guna serta menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, perhatian tidak cukup bila hanya dicurahkan untuk hari ini dan generasi sekarang saja, tetapi juga harus diarahkan

kepada masa depan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus dikendalikan agar tidak terjadi pengurasan yang berlebihan dan degradasi lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, agar peternakan berbasis sumber daya lokal dapat dikembangkan secara berkelanjutan, perlu dilakukan penghitungan sumberdaya alam dan lingkungan. Suparmoko dan Suparmoko (2000) menjelaskan empat alasan penghitungan sumber daya alam. Empat alasan tersebut ialah : Pertama untuk mengetahui volume persediaan sumberdaya alam yang ada di suatu negara. Kedua untuk melihat perubahan yang terjadi dalam persediaan sumberdaya alam. Ketiga untuk meletakkan dasar bagi perencanaan pengelolaan dan penyusunan neraca moneter sumberdaya alam. Keempat untuk mengukur nilai penyusutan sumberdaya alam dan degradasi lingkungan guna mengoreksi nilai PDB (Produk Domestik Bruto) dalam rangka merencanakan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tugas penghitungan ini tampaknya dapat dikerjakan oleh Unsoed (dalam hal ini Puslit Lingkungan Hidup) yang telah menetapkan Pembangunan Wilayah Pedesaan yang Berkelanjutan sebagai Pola Ilmiah Pokoknya.

Otonomi daerah yang sedang dan akan bergulir, diiringi pula oleh proses swastanisasi atau pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pada rakyat banyak menjadi tuntutan pemberdayaan ekonomi Indonesia. Berkenaan dengan otonomi daerah, Prof. Soedito ¹⁾

berpendapat sebaiknya Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Baturraden diarahkan untuk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pambudi (2001) mengatakan bahwa pemerintah (termasuk Pemda) harus melakukan “focusing” yakni pada peranan tidak langsung berupa penciptaan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kreativitas rakyat. Dengan perkataan lain, proses reformasi pembangunan yang sedang bergulir akan bermuara pada upaya pemanfaatan sumber daya lokal, melalui organisasinya menjadi penggerak utama perekonomian daerah dan perekonomian nasional. Kalau mengandalkan pada impor, maka upah, gaji, royalti, bunga modal dan keuntungan (yang tidak lain adalah pendapatan nasional) akan jatuh ke tangan asing atau rakyat negara lain, sedangkan rakyat Indonesia hanya memperoleh sedikit. Keadaan inilah yang terjadi selama rezim yang lalu sehingga meskipun pendapatan nasional cukup besar, rakyat kita banyak yang miskin. Oleh karena itu agar pendapatan nasional tidak lari ke luar, proses produksi nasional haruslah menggunakan sumber daya lokal (atau yang dimiliki rakyat) dan dilaksanakan langsung oleh rakyat.

Fenomena keluwesan ekonomi rakyat yang sudah mampu “menyesuaikan diri” dengan krisis, sudah dilaporkan oleh peneliti dari Bank Dunia, bahwa rakyat akan mampu bertahan, karena ekonomi rakyat memiliki daya tahan yang tinggi (tahan banting) (Mubyarto, 2000).

Pokok-pokok Pikiran

Berikut ini akan dikemukakan pokok-pokok pikiran yang sekiranya dapat disumbangkan untuk mendukung pengembangan peternakan berbasis sumberdaya lokal.

Pertama, penyusunan PETA POTENSI sumber daya lokal, lengkap dengan jenis ternak lokal unggulan daerah.

Kedua, guna menjamin kontinuitas persediaan bahan pakan, perlu dibangun gudang/silo di daerah-daerah sentra produksi. Mungkinkah kita mendirikan semacam Bulog/Dolog untuk makanan ternak?

Ketiga, pelestarian plasma nutfah/ternak asli. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh berita kegagalan peningkatan mutu genetik sapi Bali. Pengalaman buruk juga pernah terjadi pada babi Bali. Kegagalan peningkatan mutu Babi Bali terjadi ketika pemerintah ingin memperbaiki babi Bali dengan melakukan *grading-up* (silang tatar) yang bertujuan memperoleh komposisi darah impor (babi Saddle Back) 93,75% dan darah lokal 6,25%. Untung segera disadari dan dialihkan ke metode *back-cross* (silang balik) yang mempertahankan darah lokal sampai 75%, ternyata berhasil memperbaiki, laju pertumbuhan, bentuk punggung dan kualitas karkas.

Meskipun kedua kasus tersebut tidak sama, tetapi sama-sama menyadarkan kita akan pentingnya upaya mempertahankan modal dasar.

Keempat, Pendidikan Tinggi dapat berperan menyebarkan hasil-hasil

penelitian yang aplikatif melalui penerbitan majalah ilmiah populer yang komunikatif dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Mengingat pentingnya informasi dalam rangka mendorong pengembangan peternakan berbasis sumber daya lokal, Prof. Soedito mengusulkan WARINTEK. Warung Informasi Teknologi (WARINTEK) berfungsi untuk menyebarkan informasi. Dengan demikian disamping menyiapkan data-base potensi wilayah, sekaligus juga bermakna memberantas buta informasi dikalangan masyarakat luas yang dilengkapi dengan bahasa daerah, sehingga mudah diakses oleh siapa saja yang membutuhkan.

Kelima, pada tingkat peternakan rakyat, integrasi horizontal *mixed farming* ternak dengan ternak, ternak dengan tanaman atau dengan cabang usaha lain) perlu dilaksanakan untuk menaikkan efisiensi dan agar antar cabang usaha dapat saling berbagi resiko. Pada tingkat lanjut (agribisnis peternakan) perlu dijalin integrasi vertikal (keterpaduan semua sub-sistem, dari hulu sampai ke hilir) untuk menghindarkan margin ganda yang akan menaikkan harga produk menjadi lebih tinggi.

Keenam, integrasi konsep dan pelaksana naannya dari unsur-unsur yang terkait dari pusat sampai daerah.

PENUTUP

Pertama, patut kita sadari bersama bahwa upaya mengembangkan usaha rakyat kecil bukan hanya merupakan

tindakan ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi moral. Kenyataan telah membuktikan, bahwa perekonomian kita akhir-akhir ini telah diselamatkan oleh sektor usaha yang kecil-kecil ini.

Kedua, pengembangan peternakan berbasis sumber daya lokal bukan berarti gerakan antiimpor, atau alergi produk asing. Impor teknologi, tenaga ahli, atau bahan baku tidak perlu dilarang. Bantuan luar negeri juga tidak harus ditolak, namun harus ditempatkan dalam kerangka untuk memperkuat sumber daya lokal, bukan untuk menggantikannya.

Ketiga, dalam membangun peternakan yang tangguh, diperlukan kearifan (baca : kesabaran) dan persepsi yang sama. Jangan terpukau pada laju pertumbuhan saja. Pertumbuhan memang penting, tetapi bukan berarti segala-galanya. Kondisi saat ini, fondasi yang kokoh bagi bangunan ekonomi kita, jauh lebih penting daripada mengejar target. Ekonomi kerakyatan diarahkan untuk menegakkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Sejalan dengan itu, pemberdayaan peternak rakyat melalui pola kemitraan menduduki tempat yang strategis dalam rangka mengembangkan peternakan berbasis sumber daya lokal karena betapa pun indahny sebuah program, betapa pun baiknya suatu kebijakan, pada akhirnya akan terpulang kepada faktor manusia.

PUSTAKA

Daryono, 2001. Prospek Pengembangan Agribisnis Perunggasan Berbasis Sumberdaya Lokal. Makalah Seminar Nasional Pengembangan

Agribisnis Peternakan Fakultas Peternakan Unsoed Purwokerto 17-2- 2001.

Husbandry Edisi 15 Tahun XII/2001 Purwokerto. p 19

Kompas 10-9- 2001 p. 38 kolom 3.

Menteri Pertanian Dan Kehutanan, 2000. Kebijakan Pengembangan Agribisnis Dan Implikasinya Bagi Manajemen Agribisnis. Makalah Workshop Nasional Strategi Pengembangan Agribisnis Melalui Pemanfaatan Konsep Dan Desain Inkubator Di Universitas Jember 13-14 Juli 1998.

Muchdie, 1998. Kandungan impor produk-produk pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (Analisis input-ouput). Jurnal Ekonomi dan Pembangunan VI (2). 1998. PEP LIPI Jakarta.

Mubyarto, 2000. Membangun Sistem Ekonomi. Edisi Pertama. BFE Yogyakarta.

Pambudy R., 2001. Prospek Pengembangan Agribisnis Ruminansia Berbasis Sumberdaya Lokal Dan Prospek Kewirausahaan Bidang Peternakan. Makalah Utama Seminar Nasional Pengembangan Agribisnis Peternakan. Fakultas Peternakan Unsoed Purwokerto 17 Februari 2001.

Saking, N., 2001. Ayam Kampung Sulawesi Layak Dikembangkan. Infonet Majalah Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Edisi 086-September 2001 hal 25. Penerbit Asahi Jakarta.

Saragih, B., 1998. Karakteristik Agribisnis Dan Implikasinya Bagi Manajemen Agribisnis. Makalah Workshop Nasional Strategi Pengembangan Agribisnis Melalui Pemantapan Konsep Dan Desain Inkubator Di Universitas Jember 13-14 Juli 1998.

Suparmoko, M. dan MR. Suparmoko. 2000. Ekonomika Lingkungan. Edisi Pertama. Penerbit BPF: Yogyakarta.

1) Komunikasi pribadi, tanggal 3 September 2001 di Purwokerto.

Tentang pentingnya jalinan kerjasama yang harmonis, antar empat faktor penentu keberhasilan, yakni : birokrat – pakar – pelaksana dan dana.

2) Komunikasi pribadi, tanggal 6 September 2001 di Purwokerto. Khusus untuk sapi potong, perlu ada program nyata pengadaan bibit, perlu diusahakan langkah positif untuk memasyarakatkan daging kerbau, agar ternak kerbau dapat mendampingi sapi potong dalam menanggung beban sebagai pemasok daging nasional.